**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MEMBERIKAN BANTUAN DALAM
MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR
BERSUBSIDI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR:
144/PID.B/LH/2024/PN.BGR)**

Fahira Nurfayza¹, Lilik Prihatini², Herli Antoni³
fahiranurfayza14@gmail.com¹
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan tindak pidana yang merugikan negara serta bertentangan dengan prinsip distribusi energi yang adil dan tepat sasaran. Tindakan ini mencakup pengangkutan, pemindahan, atau pendistribusian BBM bersubsidi tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah. Salah satu bentuk keterlibatan dalam kejahatan ini adalah memberikan bantuan kepada pelaku utama. Terhadap perbuatan memberikan bantuan dalam kejahatan ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penulisan ini, perbuatan memberikan bantuan dalam penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana karena dianggap membantu dalam melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan bahasan dalam penulisan hukum ini, saran penulis menyarankan untuk dilakukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Bantuan, BBM Bersubsidi.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, terutama dari sektor sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam tersebut meliputi emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti halnya minyak dan gas bumi yang bersifat tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang diambil langsung dari perut bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri. Setelah proses eksplorasi dan produksi, sumber daya ini memerlukan pengangkutan yang teratur untuk didistribusikan ke berbagai lokasi. Pengangkutan minyak dan gas bumi diatur melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengangkutan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelanggaran dalam proses pengangkutan minyak dan gas bumi masih sering terjadi meskipun telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi pengalihan tujuan pengangkutan, penyelundupan, serta manipulasi data pengangkutan yang dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibat dari tindakan tersebut, negara dapat mengalami kerugian ekonomi, baik kerugian secara langsung maupun dampak jangka panjang terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Penyalahgunaan proses pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan yang dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi suatu tempat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi penyalahgunaan BBM mencakup tindakan yang melanggar ketentuan distribusi, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan BBM bersubsidi maupun non-bersubsidi.

Dalam pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi, tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum terkait pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perbuatan yang dapat dihukum mencakup setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah untuk tujuan yang tidak sah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Terkait kasus perkara yang diteliti tentang memberikan bantuan dalam menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar bersubsidi, tindakan memberikan bantuan pengangkutan dapat dianggap sebagai turut serta dalam suatu tindak pidana. Membantu melakukan pidana merupakan bentuk turut serta dimana seseorang secara aktif terlibat dalam membantu atau mendukung pelaku utama dalam melakukan tindakan kejahatan. Dalam Pasal 55 KUHP dinyatakan bahwa membantu melakukan pidana melibatkan memberi bantuan, dorongan, atau dukungan dalam melaksanakan tindakan kejahatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) melalui pendekatan perundang-undangan dan didukung penelitian empiris yang mengkaji perilaku hukum dalam masyarakat melalui wawancara ataupun pengamatan langsung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan pembahasan dilakukan melalui perolehan data yang digambarkan secara lengkap, terperinci, dan sistematis, lalu dianalisis menggunakan teori-teori ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan (*library reserch*) dan penelitian lapangan (*field reserch*) serta pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah secara kualitatif, yakni dengan berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus posisi merupakan gambaran awal mengenai perkara yang sedang dianalisis, meliputi siapa terdakwa, apa tindak pidana yang didakwanya, serta bagaimana kronologi terjadinya perkara tersebut.

Terdakwa merupakan seorang operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bertugas di SPBU Pertamina 34-16922 beralamat di Jalan Karedanan, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan yang memenuhi ketentuan dan terdaftar dalam sistem subsidi BBM. Namun dalam perkara ini, terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan pengangkutan dengan memberikan bantuan berupa pelayanan pengisian BBM bersubsidi untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan barcode kendaraanya.

Kasus tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika dua anggota Kepolisian dari Polresta Bogor Kota bernama Muhamad Zaki dan Sofyan Haerudin sedang berada di sekitar area SPBU 34-16109 UD Pandu Jaya

Warung Jambu. Keduanya mencurigai aktivitas pengisian BBM subsidi yang dilakukan oleh sebuah truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi B 9544 UDG. Kecurigaan tersebut muncul karena truk tersebut tampak keluar masuk SPBU secara tidak wajar dan tidak terdapat stiker resmi sebagai kendaraan penerima subsidi dari pemerintah, sebagaimana biasanya ditemukan pada kendaraan yang sah untuk menerima BBM subsidi jenis bio solar.

Atas dasar kecurigaan tersebut, kedua petugas kemudian mengikuti kendaraan tersebut dan menghampirinya saat sedang melakukan pengisian BBM. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, truk tersebut diketahui telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan cara menyimpan sebuah toren besar di dalam box kendaraan. Toren tersebut tersambung dengan selang dan mesin penyedot yang memungkinkan sopir memindahkan BBM dari tangki utama ke toren secara tersembunyi. Sopir dari kendaraan tersebut diketahui bernama Lisbon Limbang.

Dalam proses interogasi awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian, Lisbon (pelaku utama) mengakui bahwa ia telah beberapa kali melakukan pengisian BBM subsidi di sejumlah SPBU dengan menggunakan barcode MyPertamina yang tidak sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya. Salah satu SPBU yang disebutkan oleh Lisbon adalah SPBU 34-16922 Pasir Jambu yang beralamat di Jalan Karedanan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. SPBU tersebut merupakan tempat terdakwa Nugie Aprilian bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar.

Menindaklanjuti pengakuan Lisbon tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut ke SPBU 34-16922. Dalam penyelidikan tersebut, petugas memperoleh bukti rekaman CCTV yang menunjukkan dengan jelas bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa Nugie Aprilian melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar sebanyak 73 liter ke dalam kendaraan truk box yang dikemudikan oleh Lisbon. Proses pengisian dilakukan menggunakan barcode MyPertamina yang tidak sesuai, yaitu hanya berupa foto yang ditunjukkan melalui ponsel dan bukan barcode resmi dari kendaraan yang bersangkutan.

Selain itu, pihak penyidik juga menemukan bukti berupa riwayat komunikasi antara Lisbon dan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, ditemukan adanya kesepakatan antara keduanya untuk melakukan pengisian BBM subsidi meskipun kendaraan yang digunakan tidak terdaftar sebagai penerima subsidi. Setelah proses pengisian dilakukan, terdakwa menerima imbalan uang tunai sebesar Rp50.000 dari Lisbon sebagai bentuk kompensasi atas bantuan yang diberikan dalam proses pengisian tersebut.

Analisis Kasus

Penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan cara mengangkut, memindahkan, atau mendistribusikan BBM bersubsidi tanpa izin resmi atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BBM bersubsidi diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat tertentu agar mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau, guna menunjang kelangsungan hidup dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Namun, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pengangkutan dan pengalihan BBM bersubsidi ke pihak-pihak yang tidak berhak atau dalam jumlah yang melebihi kuota yang ditetapkan. Kondisi ini mengakibatkan subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara, baik secara finansial maupun sosial.

Dalam praktiknya, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang pengangkutan BBM bersubsidi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku utama, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang turut serta membantu, sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mengakomodasi konsep pertanggungjawaban pidana secara luas, yang sejalan dengan prinsip dalam teori pembedaan gabungan, di mana tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada mereka yang turut andil dalam memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis analisis, yaitu tindak pidana membantu penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh terdakwa, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal adalah bentuk dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana, yaitu memberikan bantuan dalam pengangkutan BBM bersubsidi secara illegal.

Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memberikan Bantuan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi dan Penanggulangannya

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegak hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

Lembaga dalam penegakan hukum terhadap kasus memberikan bantuan dalam menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu Pengadilan Negeri Bogor. Keberadaan Lembaga Pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan Hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Hakim di dalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok Pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.

Namun dalam penyelesaiannya, terdapat sejumlah kendala yang sering kali menghambat proses hukum berjalan secara optimal. Jika dianalisa berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum (aparatur), faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Hadi Erdiansyah selaku Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bogor kendala dalam penyelesaian perkara memberikan bantuan dalam menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi, yaitu sebagai berikut:

1. Modus operandi yang sulit dideteksi
2. Koordinasi antar lembaga penegak hukum kurang optimal
3. Rendahnya pemahaman hukum di masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai petugas SPBU membantu pelaku utama mengisi BBM ke mobil modifikasi, yang melanggar Pasal 55 UU Migas jo. Pasal 56 KUHP. Hakim menilai terdakwa terbukti membantu secara sadar dan menjatuhkan pidana dengan dasar teori pembedaan gabungan. Kendala utama dalam penyelesaian perkara ini adalah lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum petugas SPBU, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

SARAN

Penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan pembinaan petugas. Pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi dan edukasi hukum, serta masyarakat diharapkan tidak terlibat, aktif melapor, serta meningkatkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebok, Waltrudis. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah Berdasarkan Putusan Nomor 268/Pid.b/LH/2022/PN." Skripsi Universitas Nasional, 2023.
- Ediyasyah, Hadi. Hasil wawancara dengan Hakim Tingkat Pertama PN Bogor, Di Pengadilan Negeri Bogor, 23 Mei 2025.
- Kusoy, Nadia Silviana , dkk. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi" diterbitkan oleh Jurnal elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat (Lex Privatum Vol.IX No.11 Tahun 2021).
- Maulana, Ilham, Arianto Nurcahyono, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas" Jurnal Riset Ilmu Hukum, diterbitkan oleh Universitas Islam Bandung, (Vol. 3 No. 1 Tahun 2023).
- Nurjamal, Ecep. Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP baru), (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020).
- Puspa, Andrea. "pertanggungjawaban pidana bagi oknum tentara Nasional Indonesia angkatan darat yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama di daerah Nagreg (studi kasus putusan perkara nomor 327 K/MIL/2022)", Skripsi, Bogor: Universitas Pakuan.